

**MAKALAH**  
**ISU INTERNASIONAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Lembaga  
Internasional**

Dosen pengampu:

**Dr. Ija Suntana, M.Ag.**



**Disusun oleh :**

**Kurniawan Ahmad Safarullah      1193030047**

**HTN 6A**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI**

**BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT yang mana selalu memberikan kita nikmat sehat serta melimpahkan berkah, rahmat dan petunjuknya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini dengan judul **“ISU INTERNASIONAL”**.

Saya tentunya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan makalah ini, terutama dosen pengampu mata kuliah Lembaga-lembaga Internasional Dr. Ija Suntana, M. Ag. Penulis juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dimanapun berada.

Dengan segenap kerendahan hati, segala kritik dan saran yang bersifat membina dan membangun sangat penulis harapkan dari semua para pembaca guna agar meningkatkan dan bisa memperbaiki pembuatan makalah pada tugas yang lainnya dan pada waktu yang mendatang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan internasional kontemporer adalah ilmu, bukan hanya ini tidak hanya berfokus pada hubungan politik antar negara, tetapi juga pada hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, lembaga internasional, lingkungan, dan topik lainnya. Sejak munculnya Revolusi Industri, banyak bermunculan isu-isu baru yang menjadi fokus hubungan internasional. Salah satunya adalah masalah lingkungan yang berkaitan dengan keberadaan dan prevalensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh mesin-mesin canggih yang membakar bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dll. Hal ini menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global, yang membuat planet ini tetap hangat dari waktu ke waktu.

Kemudian, setelah berakhirnya Perang Dingin, studi hubungan internasional mulai fokus pada negosiasi kesepakatan global terkait perubahan iklim yang sangat penting. Syahperi Parera berpendapat bahwa berakhirnya era Perang Dingin telah mengantarkan dunia ke dalam tatanan perubahan baru, yang ditandai dengan empat perubahan mendasar, yaitu:

- Lanskap politik global berubah dari bipolar menjadi multipolar
- Memperkuat interdependensi antar negara dan keterkaitan antar berbagai isu global di berbagai bidang.
- Munculnya peran aktor non-pemerintah dalam hubungan internasional
- Munculnya isu-isu global baru dalam agenda internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa definisi isu hubungan Internasional?
2. Apasaja jenis-jenis Isu?
3. Apasaja tahapan dari isu?
4. Apa yang menjadi Dasar Sains Politik Hubungan Internasional Islam?
5. Apasaja yang menjadi Struktur Nilai-nilai hubungan internasional Islam?
6. Apakah ada contoh dari isu internasional?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui definisi isu hubungan internasional
  2. Mengetahui jenis-jenis isu
  3. Mengetahui tahapan-tahapan isu
  4. Mengetahui dasar sains politik hubungan internasional islam
  5. Mengetahui struktur nilai-nilai hubungan internasional islam
- Mengetahui contoh dari isu internasional

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi**

##### **1. Isu**

Harrison (2008:550) menyatakan dalam (Kriyantono, 2012) bahwa yang disebut masalah adalah berbagai perkembangan, biasanya dalam domain publik, yang jika terus berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi operasi organisasi atau kepentingan jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, masalah adalah titik awal konflik.

Sementara Prayudi (2008) mendefinisikan masalah yang muncul ketika ada ketidaksesuaian antara harapan publik dan praktik organisasi, mengabaikan masalah ini dapat berdampak buruk bagi organisasi. Pertanyaan dapat mencakup masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai.

Dengan demikian, isunya adalah ketidaksepakatan, fakta, penilaian atau kebijakan yang kontroversial yang penting bagi pihak-pihak yang terlibat.

##### **2. Hubungan Internasional (Siyasah Daulah)**

Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dua kata yang memiliki arti tersendiri. Kata siyasah berarti menata suatu benda untuk tujuan tertentu. Dan kata dauliyah adalah hubungan antara negara, kedaulatan, kekuasaan dan otoritas. Di antara berbagai makna kata dauliyah, makna yang terkait dengan kajian hubungan internasional Islam adalah hubungan antarbangsa. Jadi, siyasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kekuasaan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain.

Pengertian umum hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang ditetapkan secara global untuk memecahkan berbagai masalah pertanyaan. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara, kelompok negara dan masyarakat di dunia, serta kekuatan dan proses yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Putuskan bagaimana hidup, berpikir, dan bertindak. Secara internasional, ada banyak interaksi antara negara dan

komunitas internasional (Darmayadi 2015:22). Sedangkan menurut K.J Holsti istilah relasi Internasional selalu tentang semua bentuk interaksi antara orang-orang rakyat negara, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah atau Menurut negara (Sitepu 2011:19).

## **B. Jenis-Jenis Isu**

Menurut ahli yang bernama Gaunt and Ollenburger (1995), kita dapat membagi isu dan dapat kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Berdasarkan sumber isu, yaitu:

1. Isu Internal, berupa isu yang datangnya dari dalam organisasi, atau lebih luasnya datang dari dalam negara
2. Isu Eksternal, isu yang datangnya dari luar organisasi atau dari luar negara, namun pengaruhnya terasa ke dalam negara.

Yang kedua adalah luasnya masalah. Ada 4 (empat) kategori masalah, yaitu (1) masalah umum, yaitu masalah yang secara langsung mempengaruhi banyak orang, bersifat umum dan berpotensi mempengaruhi individu, dan masalah ini lebih dekat. (2) Isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi banyak orang seperti isu-isu umum. Pertanyaan itu muncul karena disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengaku mewakili kepentingan publik. Masalah ini potensial. (3) Masalah selektivitas, yaitu masalah yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Masalah yang muncul mungkin terkait dengan kepentingan banyak orang, tetapi hanya beberapa orang yang akan terpengaruh oleh masalah ini dan lebih memperhatikan konten ini. (4) Isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya dibahas atau dikembangkan di antara para ahli.

## **C. Tahapan Isu**

Ada perbedaan bernuansa antara masalah dan krisis, dan penting bagi humas untuk memahami tahap perkembangan masalah. Menurut Crabel & Vibbert dan Gaunt & Ollenburger, masalah seringkali berubah menjadi krisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahapan Origin (Potential Stage)

Penjelasan pada tahap ini, seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu dan opini. Ini memang merupakan

sebagai tahap penting yang pada akhirnya akan menentukan apakah isu itu dapat dimanajemen dengan baik atau tidak. Public relations ini kehadirannya harus proaktif untuk memonitor lingkungannya.

b. Tahap Mediation dan Amplification. (immiment stage / emerging)

Penjelasan pada tahap ini, isu mulai berkembang karena memang isu yang ada tersebut telah mempunyai dukungan secara public, dimana ada berbagai kelompok yang lain yang saling mendukung bahkan sampai memberikan perhatian pada berbagai isu tersebut.

c. Tahap Organization (current stage dan critical stage)

Dapat pula kita sebut sebagai tahap organisasi, disebut demikian karena memang pada tahap ini kita akan menemukan public sudah mulai mengorganisasikan diri bahkan public pun mulai untuk membentuk jaringan yang cukup meluas. Menurut Hainsworth, bahwa tahap organisasi ini dapat disebutkan sebagai tahap yang krisis.

d. Tahap Resolution (dormant stage)

Penjelasan pada tahap ini, yang mana pada dasarnya sebuah organisasi itu dapat mengatasi berbagai macam isu dengan sangat baik, sehingga isu-isu yang sudah diasumsikan telah berakhir sudah dan sampai seseorang pun memunculkan kembali dengan pemahaman dan permasalahan baru atau bahkan muncul isu-isu baru yang mana ternyata memiliki keterikatan dengan isu yang sebelumnya dapat di selesaikan.

#### **D. Dasar Sains Politik Hubungan Internasional Islam**

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu-ilmu sosial empiris didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia adalah teratur. Ilmu sosial positif menolak segala bentuk pengetahuan yang didasarkan pada konsep-konsep yang tidak realistis di luar alam. Pandangan ini kemudian menjadi gerakan ilmiah positivisme logis, yang mengacu pada realitas deterministik terukur dengan mengabaikan legitimasi fakta irasional.

Tidak kurang dari 700 ayat dalam Al-Qur'an membimbing manusia untuk menyelidiki, berpikir, bernalar, memahami dan memahami alam, sejarah, dan

perilaku manusia. Akal manusia dituntut untuk digunakan sebagai alat untuk menemukan pengetahuan yang sebenarnya. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kecerdasan manusia. Jadi terkadang nalar gagal memberikan pengetahuan yang sebenarnya tentang apa yang dibutuhkan dan ingin diketahuinya.

#### **E. Struktur Nilai-nilai hubungan internasional Islam**

Struktur nilai hubungan Internasional memang sedikit berbeda dari yang lainnya, dan nilai ini menjadi patokan tegaknya hubungan Internasional islam dengan berbagai negara yang lain. Yaitu:

- a. Nilai Ketauhidan
- b. Nilai Kekhilafahan
- c. Nilai ibadah
- d. Nilai keilmuan
- e. Nilai halal dan haram
- f. Nilai keadilan
- g. Nilai istihlah
- h. Nilai ‘adam al-dhaya

#### **F. Contoh Isu Internasional**

Aspek kependudukan yang dibahas meliputi penelitian kualitatif dan kuantitatif, antara lain kendala minimnya jumlah penduduk dan kualitas penduduk, kebutuhan SDM birokrasi, serta keseimbangan dan koordinasi persebaran penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melahirkan paradigma baru sistem manajemen pemerintahan daerah. Sebagai tugas reformasi, otonomi daerah sangat penting bagi daerah otonom untuk mewujudkan potensi daerahnya. Asas pemisahan kekuasaan merupakan pedoman yang dibutuhkan daerah otonom. Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, daerah otonom adalah “kesatuan masyarakat berupa badan hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut sistem kehendak rakyat Republik Indonesia” (Undang-Undang, 2005).



Kita akan coba sedikit kaji bagaimana Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran suatu daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik dalam propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a) Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- b) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c) Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
- d) Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e) Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Sendiri Khusus Provinsi Papua. Dalam konteks ini, pemekaran Papua bersifat khas karena tidak perlu melalui zona persiapan dan tidak harus memenuhi persyaratan dasar atau administratif. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 93 PP No.106/2021. Ketentuan lengkapnya adalah sebagai berikut (1) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membagi provinsi dan kabupaten/kota di Papua menjadi daerah otonom. (2) Pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk: mempercepat pembangunan tata ruang B. mempercepat peningkatan pelayanan publik C. mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan D. Angkat harkat dan martabat OAP. (3) Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kemampuan ekonomi. (4) Pemekaran provinsi, kabupaten (kota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melalui tahap persiapan daerah, dan tidak memenuhi syarat dasar dan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah Otonom Baru (DOB) harus melewati zona persiapan saat mereka berkembang. Jika tidak ada pengembangan di zona persiapan, maka akan kembali ke zona induk (Dita, 2021).

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

masalah adalah berbagai perkembangan, biasanya dalam domain publik, yang jika terus berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi operasi organisasi atau kepentingan jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, masalah adalah titik awal konflik.

Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dua kata yang memiliki arti tersendiri. Kata siyasah berarti menata suatu benda untuk tujuan tertentu. Dan kata dauliyah adalah hubungan antara negara, kedaulatan, kekuasaan dan otoritas. Di antara berbagai makna kata dauliyah, makna yang terkait dengan kajian hubungan internasional Islam adalah hubungan antarbangsa. Jadi, siyasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kekuasaan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain.

Menurut ahli yang bernama Gaunt and Ollenburger (1995), kita dapat membagi isu dan dapat kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Berdasarkan sumber isu, yaitu Isu Internal dan Isu Eksternal.

Tidak kurang dari 700 ayat dalam Al-Qur'an membimbing manusia untuk menyelidiki, berpikir, berpikir, bernalar, memahami dan memahami alam, sejarah, dan perilaku manusia. Akal manusia dituntut untuk digunakan sebagai alat untuk menemukan pengetahuan yang sebenarnya. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kecerdasan manusia. Jadi terkadang nalar gagal memberikan pengetahuan yang sebenarnya tentang apa yang dibutuhkan dan ingin diketahuinya.

Struktur nilai hubungan Internasional memang sedikit berbeda dari yang lainnya, dan nilai ini menjadi patokan tegaknya hubungan Internasional Islam dengan berbagai negara yang lain. Terdapat 8 nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Suntana, Ija dan Mahmud. (2018). Paradigma Hubungan Internasional: Perspektif Ilmu Politik Islam, Medwell Journals, the social Sciences 13 (4)
- R. Pugu, Melyana. (2022). PRO DAN KONTRA ISU PEMEKARAN PAPUA SUATU KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7, No. 4.

